

TAJUK RENCANA

Pelajaran Berharga Bagi Mendikbudristek

AKHIRNYA, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim memastikan persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki minimal 60 peserta didik, tidak berlaku di tahun 2022 (KR, 9/9). Artinya, semua sekolah, berapapun peserta didiknya, akan menerima uang BOS.

Keputusan ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan sensitivitas Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap ancaman munculnya kecemburuan masyarakat secara luas. Bagaimana tidak, kalau pemerintah sampai membeda-bedakan penerima dalam membagikan uang kepada masyarakat, pasti akan menimbulkan rasa cemburu, iri, bahkan bisa berdampak luas. Apalagi sebelumnya sudah diingatkan oleh ormas yang memiliki sangat banyak lembaga pendidikan, NU maupun Muhammadiyah.

Namun di sisi lain kasus ini mestinya menjadi pelajaran berharga bagi Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jangan sampai terjadi kasus sejenis di masa-masa mendatang. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Kemendikbudristek mendapat protes keras terkait penyusunan Kamus Sejarah Indonesia, yang tidak mencantumkan tokoh-tokoh besar dan mempunyai peran penting dalam sejarah Indonesia, misalnya Hadrotusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari. Sebaliknya justru memunculkan tokoh baru yang perannya tidak sebanding dengan tokoh yang mestinya ada.

Jawaban Mendikbudristek Nadiem waktu itu sama dengan kasus pembatasan sekolah penerima BOS, yaitu rumusan tersebut disusun sebelum dirinya menjadi menteri. Dengan dua kenyataan ini, kiranya Mendikbudristek perlu mengevaluasi segenap jajarannya, jangan sampai ada yang tidak memahami keadaan yang sebenarnya atau memang mempunyai agenda tertentu, sehing-

ga di masa mendatang tidak muncul lagi kebijakan yang justru menimbulkan kontraproduktif. Begitu juga perlu mencermati lagi setiap keputusan atau aturan yang akan dijalankan. Karena meski yang merumuskan orang sebelum dirinya menjadi menteri, tetapi ia menjadi orang yang paling bertanggungjawab di lingkungan Kemendikbudristek.

Apalagi selama ini sering kita dengar adanya wacana kebijakan yang menimbulkan reaksi negatif masyarakat, baik kalangan pendidik maupun orang awam. Misalnya wacana pembatasan pelajaran sejarah dan pelajaran sejarah tidak wajib dalam kurikulum baru. Selain itu juga sering muncul kasus materi buku ajar yang isinya tidak benar, menyinggung SARA atau berbau politis. Hal ini menunjukkan pengawasan yang masih lemah, sehingga materi tersebut sampai lolos cetak.

Agar di masa-masa mendatang tidak muncul masalah-masalah lagi di dunia pendidikan, sebaiknya jajaran Kemendikbudristek menjalin hubungan baik dengan mitra kerjanya di bidang pendidikan, yaitu NU, Muhammadiyah, Tamansiswa, Yayasan Kanisius, De Britto, PGRI, dan lainnya. Setiap akan membuat kebijakan, perlu melakukan *sharing* dengan mereka. Pasti para stakeholder yang mengetahui secara persis problema dunia pendidikan akan memberi banyak masukan, sehingga akan dihasilkan keputusan yang terbaik bagi seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai, saat kebijakan akan diterapkan mereka baru tahu, dan akhirnya protes.

Kita juga berharap, tidak diberlakukannya pembatasan jumlah peserta didik sekolah penerima BOS ini tidak hanya untuk tahun 2022 saja, tetapi juga di tahun-tahun berikutnya. Pendek kata, sampai kapanpun jangan ada perlakuan membeda-bedakan sekolah atau peserta didik. Semua mempunyai hak yang sama dan hal ini juga dijamin oleh UUD 1945. □

Kemiskinan Ekstrem, Bagaimana DIY?

Anif Muchlashin

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi DIY. Monitoring dan evaluasi program kegiatan kemiskinan terus diupayakan meskipun berada di tengah anggaran *refocusing* pada program prioritas penanganan pandemi Covid-19. Pemetaan kantong kemiskinan hingga tingkat kapanewon (kecamatan) sampai kalurahan terus dilakukan sebagai upaya memetakan zona kemiskinan agar kemiskinan dapat teratasi.



KR-JOKO SANTOSO

BPS merupakan institusi yang menghitung angka kemiskinan dengan lingkup makro sedangkan Dinas Sosial sebagai penerjemah program dengan data mikro. Hingga lingkup rumah tangga bahkan individu melalui *by name by adress* melalui progam satu data, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini kemudian menjadi pedoman untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk DIY.

Upaya penanggulangan kemiskinan saat ini juga dilaksanakan bukan hanya dari pihak pemerintah saja. Juga dilakukan bersama lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan perusahaan baik BUMN/BUMD melalui pro-

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Permainan Tradisional Atasi Kejenuhan

SEJAK Maret 2020, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Situasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Pembelajaran yang semula dilakukan secara luar jaringan (*luring*), kini beralih menjadi dalam jaringan (*daring*) melalui ruang virtual meet, zoom atau akses lainnya. Hal ini menjadi skala prioritas utama demi kesehatan dan keamanan bersama.

Berbagai masalah juga muncul dalam situasi saat ini. Anak-anak terbiasa menggunakan gawai terlalu lama bahkan kecanduan game online. Kini anak berubah menjadi sosok yang individual dan egois. Anak jauh lebih asyik menghabiskan waktunya dengan bermain gawai dari pada membaca buku. Keadaan tersebut menjadikan situasi yang kurang sehat terlebih akan berpengaruh dengan tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, memanfaatkan permainan tradisional dapat menjadi solusi bagi orangtua dan anak. Permainan tradisional juga banyak ragamnya seperti egrang, bakiak, congklak, dam-daman, engklek, dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam per-

mainan tradisional, seperti melatih sistem motorik anak, melatih diri dalam mengembangkan sikap sosial, sikap spiritual, dan membangun nasionalisme dalam melestarikan permainan tradisional.

Melalui peran dan manfaat permainan tradisional itulah, orangtua dan anak dapat berkolaborasi melakukan kegiatan positif dan bermanfaat dalam masa pandemi Covid-19 tanpa menghilangkan peran orangtua sebagai sosok teman sekaligus guru. Melalui pendampingan orangtua, pemanfaatan permainan tradisional dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memberikan nilai-nilai edukatif dalam setiap tumbuh kembang anak.

Permainan tradisional menganandung banyak manfaat seperti melatih kerja sama tim, melatih sistem motorik, meningkatkan konsentrasi, dan menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya. Permainan tradisional egrang dan bakiak dapat menjadi alternatif solusi pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi. □

**J Khoniatur Rohmah, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAD Yogya.*

BOCORNYA data pribadi ke dunia sosial media kerap terjadi di Indonesia. Padahal data tersebut seharusnya mendapat perlindungan dan dijamin kerahasiaan. Tragisnya, justru mudah bocor. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Selain sangat rentan untuk disalahgunakan, kebocoran data pribadi ke publik merupakan kelemahan sistem perlindungan negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negara.

Data pribadi merupakan hak dasar yang harus mendapat perlindungan negara. Hal yang bersifat privasi. Data privasi termasuk bagian hak asasi manusia yang termuat dalam *International Covenant Political and Civil Right* (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia dalam UU No 12 Tahun 2005. Jauh sebelum itu, konstitusi UUD 1945 telah menggaransi. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* (Pasal 28 G ayat (1)).

Afirmasinya, sebagai suatu hak warga negara yang dimuat dalam konstitusi maka menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan menggaransi data pribadi atau privasi tersebut. Data privat tersebut berupa informasi privasi (data kredit dan catatan medis); informasi secara fisik (berkaitan dengan informasi badan atau tubuh), privasi komunikasi (mencakup keamanan dan privasi surat, telepon, email, dan bentuk komunikasi lainnya, dan privasi teritorial (<https://www.gile.nl/>)).

Perlindungan data pribadi semakin urgen seiring dengan koneksi berbasis

Toba Sastrawan Manik

seluler melalui jaringan dan telepon genggam. Saat ini data pribadi semakin terkoneksi dan terbuka sehingga semakin membutuhkan perlindungan. Dalam Global Internet Libery Campaign (<https://www.gile.nl/>) disebutkan, setidaknya ada tiga *trend* yang memungkinkan pelanggaran data privasi. Ketiga trend itu ialah : *globalisasi* yang membuat aliran data menembus data geografical; *Konvergensi*, sistem informasi yang memungkinkan penghapusan hambatan teknologi antara sistem. Sistem informasi modern semakin dapat dioperasikan dengan sistem lain, dan dapat saling bertukar dan memproses berbagai bentuk data; Ketiga, *multi-media* memadukan banyak bentuk transmisi dan ekspresi data dan gambar. Sehingga informasi yang dikumpulkan dalam bentuk tertentu dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam bentuk lain.

Perlindungan data privasi dalam dunia digital terkoneksi luar biasa, luas, dan kompleks hanya bisa dilakukan negara sebagai penghimpun data warga negara dan pemilik *power* kuat. Indonesia sebenarnya telah memiliki perlindungan dalam konstitusi dan beberapa regulasi hukum. Namun bentuk perlindungan tersebut tidak terintegrasi dalam satu payung hukum. Regulasi-regulasi tersebut tersebar dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016, UU Adminduk No. 24 Tahun 2013, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lainnya. Sulit membayangkan warga

negara Indonesia yang hampir mencapai 300 juta belum memiliki sistem perlindungan data pribadi kuat dan terintegrasi. Terkait data pribadi seperti nomor Hp misalnya, ada keheranan ketika begitu banyak muncul iklan melalui pesan singkat. Dari mana mereka tahu nomor operator seluler kita? Hal ini tentu menganggu.

Demikian juga ketika berhubungan institusi tertentu baik swasta maupun pemerintah. Terkadang kurang adil ketika harus mengisi dengan data pribadi dan memberikan garansi bahwa data yang diisi adalah data benar bahkan bermaterai. Namun sangat jarang pada saat yang sama kita disodorkan sebuah garansi bahwa data tidak akan disalahgunakan atau disebarluaskan begitu saja. □

**J Toba Sastrawan Manik, Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FIS Universitas Negeri Yogyakarta.*

Pojok KR
Bantuan untuk sejuta PKL dan Warung segera cair.
-- Angin segar bagi masyarakat bawah.

24 sekolah di DIY bakal ujicoba PTM.
-- Untuk percobaan bagi yang lain.

Pengawasan objek wisata tetap digenarkan
-- Meski level turun, tak boleh lengah.
Berabe

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyanto Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.